

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR PUTUSAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2. Pendekatan Masalah	5
1.5.3. Bahan Hukum	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	8
1.6. Kerangka Teoritik	9

1.6.1. Penyelidikan dan Penyidikan	9
1.6.2. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	10
1.6.3. Jaksa Penuntut Umum	12
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 130/PUU-XIII/2015

.....	18
2.1. Mahkamah Konstitusi	18
2.1.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	18
2.1.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	20
2.1.3. Putusan Mahkamah Konstitusi	33
2.1.4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	36
2.2. Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum	41
2.3. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	54

BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PRAPERADILAN AKIBAT

TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XII/2015

.....	64
3.1. Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	64
3.1.1. Skematis Sistem Peradilan Pidana	64
3.1.2. Upaya Hukum Sebagai Perlindungan Hukum	73

3.2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana	76
3.3. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 .84	
3.4. Ratio Decidendi Putusan Praperadilan Akibat Keterlambatan atau Tidak Diserhkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	93
3.4.1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotamubagu Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN.Ktg	93
3.4.2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Lbj	101
3.4.3. Analisis Putusan	130
BAB IV PENUTUP	140
4.1. Kesimpulan	140
4.2. Saran	141
DAFTAR BACAAN	